

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian padi memegang peranan utama pada pembangunan ekonomi, pemenuhan kebutuhan pangan, dan penyediaan lapangan kerja, khususnya di daerah perdesaan (Hasibuan *et al.*, 2022). Padi merupakan makanan pokok bagi mayoritas penduduk Indonesia dengan tingkat konsumsi mencapai 120 kg/tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata konsumsi dunia yang hanya sekitar 60 kg/tahun (Ariska & Qurniawan, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian tanaman pangan, dengan komoditas padi sebagai penyumbang utama, yang berkontribusi cukup kompleks pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan berada pada kisaran 2,82–3,07%. Selain itu, sektor ini juga menunjukkan laju pertumbuhan yang cenderung meningkat hingga mencapai 3,68% selama periode 2019–2023 (Darmawan, 2023).

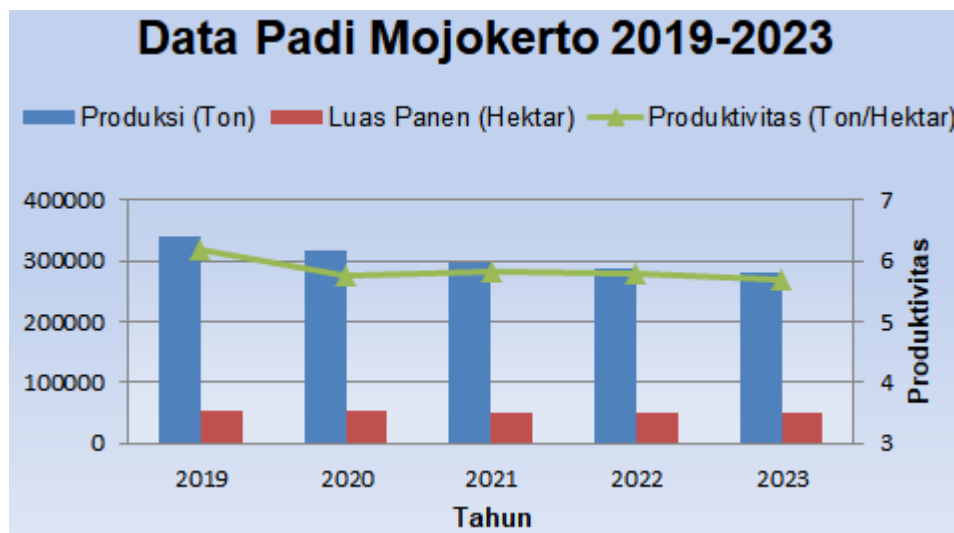
Namun produktivitas usahatani padi sering kali terhambat, karena keterbatasan modal atau kesulitan akses petani terhadap pembiayaan yang aman, murah, dan mudah dari bank maupun lembaga terkait (Idris *et al.*, 2024). Modal adalah faktor penting yang memungkinkan petani membeli *input* produksi meliputi benih, pupuk, pestisida, maupun membayar tenaga kerja tepat waktu (Umar *et al.*, 2023). Permasalahan modal menyebabkan sebagian besar petani hanya mampu mengandalkan dana pribadi atau sumber pembiayaan informal, yang memiliki bunga tinggi dan syarat lebih memberatkan (Kusumaningsih *et al.*, 2025).

Pemerintah dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berupaya mempermudah cara petani memperoleh pembiayaan formal dengan bunga yang relatif rendah dan persyaratan yang mudah (Burhansyah, 2021). Data penyaluran KUR menunjukkan tren peningkatan signifikan dari Rp 22,75 triliun pada 2015 menjadi Rp260,26 triliun pada 2023, kondisi ini menggambarkan adanya penerimaan positif oleh sektor riil termasuk pertanian pangan seperti padi (Asworo *et al.*, 2024). Namun demikian, tingkat penyerapan KUR di kalangan petani masih relatif rendah karena berbagai kendala seperti prosedur administrasi yang rumit, keterbatasan akan jaminan, dan ketakutan pada risiko gagal bayar (Nurdin *et al.*, 2024).

Penyerapan kredit yang rendah berimplikasi pada terbatasnya kemampuan petani untuk membeli *input* produksi dalam jumlah optimal,

sehingga berdampak negatif terhadap efisiensi teknis usahatani (Susanto *et al.*, 2021). Efisiensi teknis mencerminkan kemampuan petani dalam memproduksi *output* maksimal melalui *input* yang tersedia (Matseri *et al.*, 2025). Penelitian di Desa Waimital menunjukkan bahwa petani penerima KUR mempunyai tingkat efisiensi teknis lebih unggul dari petani tanpa akses kredit. Namun pada penelitian serupa, besaran nilai kredit justru berpengaruh negatif terhadap pendapatan, akibat tingginya biaya bunga dan ketergantungan harga *output* fluktuatif (Ayal *et al.*, 2024).

Selain karena faktor kredit, penelitian usahatani padi Desa Rambah menunjukkan bahwa luas lahan, jumlah tenaga kerja, penggunaan bibit, pupuk dan pestisida memiliki pengaruh signifikan pada produksi usahatani padi (Fitriana *et al.*, 2020). Selanjutnya, penelitian usahatani padi organik Provinsi Lampung menyatakan tingkat efisiensi usaha tani yang tinggi di daerah tersebut, dipengaruhi faktor inefisiensi seperti pengalaman petani dan keikutsertaan dalam kelompok tani (Lestari *et al.*, 2023). Oleh karena itu, pemahaman dan identifikasi yang komprehensif terhadap berbagai faktor tersebut menjadi penting untuk merumuskan rekomendasi strategi pengembangan usahatani yang lebih tepat (Hasbiadi & Masitah, 2023).



Gambar 1.1 Grafik Produksi, Luas Lahan, serta Produktivitas Padi Mojokerto

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (2024)

Produksi padi di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 mengalami penurunan 5 tahun terakhir, yaitu sebesar 281.829,41 ton dengan luas tanam 49.395,45 ha dan produktivitas sekitar 5,706 ton/ha. Produktivitas tersebut masih di bawah kabupaten lain, seperti Blitar, Malang, Sidoarjo,

Jombang, Magetan dan Gresik yang semua produktivitasnya lebih dari 6 ton/ha dengan luas lahan serupa (BPS Jawa Timur, 2024). Salah satu wilayah yang berperan besar terhadap produksi padi kabupaten tersebut ialah Desa Penanggungan. Desa ini tercatat sebagai wilayah dengan luas lahan panen padi terbesar di Kecamatan Trawas, yakni kurang lebih 296 ha atau 21,97% dari total luas panen kecamatan (BPS Kabupaten Mojokerto, 2024). Besarnya kontribusi lahan tersebut menjadikan Desa Penanggungan representasi yang relevan untuk melihat kondisi produksi padi Kabupaten Mojokerto secara lebih mendalam. Meskipun begitu, produktivitas padi Desa Penanggungan tahun 2024 hanya mencapai 5,10 ton/ha, lebih rendah dibandingkan rata-rata produktivitas nasional lima tahun terakhir sebesar 5,19 ton/ha (PUSDATIN, 2024). Kesenjangan tersebut mengisyaratkan produksi padi Desa Penanggungan belum mencapai tingkat efisiensi optimal.

Permasalahan ini semakin menarik ketika dikaitkan dengan akses pembiayaan petani. Meskipun penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada bidang pertanian secara nasional menunjukkan tren peningkatan, pemanfaatannya oleh petani padi wilayah perdesaan, khususnya Desa Penanggungan masih terbatas (Burhansyah, 2021). Penelitian Rasoki & Sudhiebo, (2019) menunjukkan tingkat penyaluran KUR pada subsektor pertanian rakyat masih belum optimal, hanya sebesar 22,63% dari target 60%. Banyak petani tetap bergantung penggunaan modal sendiri saja, sehingga kapasitas mereka untuk meningkatkan penggunaan *input* atau memperbaiki praktik budidaya menjadi terbatas. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah peningkatan akses KUR di tingkat nasional betul-betul diikuti oleh perbaikan efisiensi teknis usahatani di tingkat desa.

Sejauh ini, sebagian besar penelitian efisiensi teknis usahatani padi masih dilakukan pada skala wilayah yang lebih luas, sehingga kajian pada tingkat desa, seperti Desa Penanggungan, khususnya terkait peran akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih jarang dilakukan. Namun demikian, keberadaan kebijakan KUR dirancang untuk mendorong peningkatan produktivitas serta memperkuat kapasitas ekonomi petani. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki urgensi memetakan pengaruh akses KUR terhadap efisiensi teknis usahatani padi. Maka melalui pendekatan ini, hasil penelitian tidak hanya memperkaya literatur efisiensi teknis dalam konteks pengaruh KUR. Namun juga, memberikan masukan praktis bagi petani padi dan

pemerintah atau lembaga setempat dalam penyaluran atau pemanfaatan kebijakan KUR di Desa Penanggungan .

1.2 Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efisiensi teknis usahatani padi di Desa Penanggungan, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap efisiensi teknis usahatani padi di Desa Penanggungan?
3. Apakah terdapat perbedaan tingkat efisiensi teknis antara petani penerima dan *non* penerima KUR di Desa Penanggungan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi teknis usahatani padi di Desa Penanggungan, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto.
2. Menganalisis pengaruh pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap efisiensi teknis usahatani padi di Desa Penanggungan.
3. Menganalisis perbedaan tingkat efisiensi teknis antara petani penerima dan *non* penerima KUR di Desa Penanggungan.

1.4 Manfaat Penelitian

- Petani Padi Setempat
Penelitian diharapkan dapat mendorong petani dalam mengelola modal dan *input* produksi secara lebih bijak serta terdorong memanfaatkan pembiayaan formal yang lebih ringan dibandingkan pinjaman informal.
- Universitas
Penelitian ini menambah referensi ilmiah universitas dalam bidang agribisnis, ekonomi pertanian, dan manajemen pembiayaan. Hasilnya memperkuat peran universitas sebagai pusat penelitian dan pengabdian masyarakat melalui kontribusi penyelesaian masalah pertanian.
- Mahasiswa
Penelitian ini sebagai sumber referensi akademik mahasiswa sekaligus pengalaman penelitian lapangan, agar dapat meningkatkan keterampilan analisis, metodologi, serta kepedulian terhadap persoalan nyata petani.
- Pemerintah Daerah
Penelitian ini menjadi masukan dalam evaluasi efektivitas program kredit, perumusan kebijakan pembiayaan pertanian yang inklusif, serta strategi peningkatan produktivitas pada dukungan modal kerja tepat sasaran.